

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Oleh

Afifah Maharani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia dan akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, terjadi perubahan dinamis terhadap akibat hukum pembubaran partai politik sejak Orde Lama sampai Reformasi seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang partai politiknya dibubarkan tidak ada akibat hukum berupa pemberhentian di tengah masa jabatan maupun akibat hukum yang lain. Ketiadaan akibat hukum tersebut, jika dibandingkan dengan akibat hukum yang dikenakan bagi anggota DPRD, tidak mencerminkan hukum yang adil dan tidak sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci : Keadilan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik, Pembubaran, Persamaan di Hadapan Hukum